



Menata Kesengkarutan Kebun Sawit di Hutan

Pengantar:
Media Indonesia berkolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menyajikan hasil penelitian ilmiah dan kerja pengabdian masyarakat. Kami ingin berkontribusi agar sains lebih membumi.



Dr Hero Marhaento SHut MSI
Ketua peneliti
marhaento@ugm.ac.id

Jabatan

- Dosen Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan
- Ketua Komite Riset Fakultas Kehutanan UGM (2020-sekarang)
- Ketua Tim Strategi Jangka Benah Fakultas Kehutanan UGM (2018-sekarang)

Pendidikan

- S-3, Water Engineering and Management, University of Twente, Belanda
- S-2, Geo-Information for Disaster Management, Ilmu Lingkungan UGM-ITC, Belanda
- S-1, Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan UGM

Penghargaan

- Penulis Jurnal Produktif Fakultas Kehutanan UGM (2018, 2019, 2020, 2021)
- Penerima Beasiswa BPPLN S-3 Dikti

Anggota Tim Peneliti

- Dr Budiadi SHut Magr
- Dr rer silv Muhammad Ali Imron SHut MSc
- Dr Ari Susanti SHut MSc
- DrDwiko Budi Permadi SHut MSc
- Slamet Riyanto SHut MSI
- Fiqri Ardiansah SHut MSc
- Dr Forst Ir Bambang Irawan SP MSI
- Dr Yanarito
- Dr Ir Handoyo Hadi Nurhanto M Agr Sc

Anggota Tim Pendukung

- Stevie Vista Nissauqodry SHut MSc
- Darmawati Ridho SHut
- F Triangga Prihutama SHut
- Andika Putri Cahyani AMD
- Muh Guruh Susanto
- Andre Septian Prasetyo SKom

Kontak Informasi:

www.jangkabenah.org
Sekretariat Jangka Benah,
Gd A It 3 Fakultas Kehutanan UGM
Jl Agro 1, Bulaksumur, Sleman
Yogyakarta

Kesengkarutan 'ketelanjuran' kebun sawit di kawasan hutan mendorong peneliti UGM untuk mencari solusi yang bisa diterima semua pihak, terutama rakyat.

Hero Marhaento

SEKITAR 40 petani sawit dari Jambi dan Kalimantan Tengah terlihat antusias mengikuti Sekolah Jangka Benah perdana yang diadakan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pertengahan Juni lalu. Mereka aktif berdiskusi dan menyampaikan masukan tentang masalah yang dihadapi.

Selain menerima materi di dalam kelas, para peserta menjalani kegiatan lapangan berupa studi ke agroforestri sawit di Cempaga Hulu, kebun bibit desa (KBD), serta demonstration plot (demplot) di Desa Karang Sari, Parenggean, Kotawaringin Timur. Kegiatan itu juga diikuti staf pemerintah daerah dan pusat.

Pihak UGM telah membuat sekolah yang dapat diikuti semua pihak. Tempat pembelajaran itu mengajarkan tiga keahlian utama, yakni kompetensi dasar, inti, dan minat, seperti teknik silvikultur, perhutanan sosial, dan resolusi konflik. Sejauh ini, sudah 90 petani binaan UGM yang menerapkan konsep jangka benah.

Sistem jangka benah merupakan solusi penyelesaian ketelanjuran kebun rakyat dan korporasi (sawit) di dalam kawasan hutan. Hal itu juga diamanatkan dalam PP No 23 dan 24 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK No 7, 8, dan 9 Tahun 2021.

Sistem itu bertujuan mengubah kebun kelapa sawit monokultur menjadi kebun campur sawit dalam bentuk agroforestri. Tujuan lainnya meningkatkan struktur dan fungsi ekosistem agroforestri kelapa sawit sehingga menyerupai hutan alami (close to nature).

Memberikan solusi

Tidak dimungkiri minyak sawit ialah komoditas unggulan penopang ekonomi nasional dan mata pencaharian masyarakat di pedesaan. Sejak 2008, Indonesia telah menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia. Industri itu penyumbang terbesar devisa negara yang mampu memberikan 17 juta lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung.

Namun, booming ekonomi kelapa sawit telah memicu persoalan lain, yakni masalah ekologi yang dipermasalahkan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri. Ekspansi kebun kelapa sawit, terutama ke dalam kawasan hutan, dituding sebagai penyebab utama terjadinya deforestasi.

Masalah itu mengancam habitat berbagai tumbuhan dan satwa liar, meningkatnya frekuensi bencana banjir dan kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan yang dampak asapnya dirasakan hingga di negara tetangga (transboundary haze pollution).

Tudingan tersebut bukan tanpa alasan. Pada



Penanaman tanaman kayu pencampur.



Kebun bibit meranti di kampus lapangan Wanagama II.



Kebun bibit desa penyuplai kebutuhan jangka benah.



Pemantauan performa pertumbuhan tanaman.

2019, Komisi Pemberantasan Korupsi, berkolaborasi dengan berbagai lembaga, merilis data tutupan tanaman kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,8 juta hektare. Auriga Nusantara menyebutkan sekitar 3,4 juta hektare (20,2%) di antaranya berada di dalam kawasan hutan dan statusnya ilegal. Itu termasuk kebun sawit yang dikelola perusahaan dan masyarakat, tersebar dari Sumatra, Kalimantan, hingga Papua.

Upaya pemerintah untuk mengatasi konflik agraria atas 'ketelanjuran' kebun sawit tersebut sedari awal belum benar-benar menemukan solusi terbaik. Pendekatan peraturan atau hukum yang digunakan pemerintah lebih bersifat koersif. Jika itu dikedepankan, dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik terbuka dengan masyarakat.

Perhutanan sosial dan reforma agraria yang digaungkan pemerintahan Presiden Joko Widodo berusaha mengurai persoalan tersebut. Seperti skema pelepasan kawasan hutan atau pemberian izin kelola kepada kelompok

masyarakat petani hutan melalui izin perhutanan sosial.

Namun, berbagai peraturan yang ada belum mengakomodasi keberadaan kebun sawit dalam kawasan hutan. Padahal, persoalan kebun rakyat di kawasan hutan itu sebagian besar ialah kebun sawit.

Konsep jangka benah

Kesengkarutan persoalan kebun sawit di kawasan hutan yang berkepanjangan memicu Fakultas Kehutanan UGM untuk turut berpikir mencari solusinya. Sejak 2018, tim kecil yang dibentuk mengadakan berbagai diskusi multipihak dan lintas disiplin untuk mencari solusi terbaik.

Pada akhirnya, tim tersebut menyusun kertas posisi yang dirilisnya dilaksanakan saat Dies Ke-55 Fakultas Kehutanan UGM. Istilah jangka benah sebagai alternatif solusi persoalan kebun sawit rakyat di kawasan hutan mulai dikenalkan perdana pada kertas posisi

tersebut.

Bagi rimbawan, istilah jangka benah bukan hal yang baru karena diterapkan pada pengelolaan hutan Jati di Jawa di awal abad ke-20. Pada masa itu, jangka benah merupakan periode waktu untuk membenahi kondisi hutan produksi yang mengalami penurunan produktivitas.

Dengan landasan filosofi yang sama, konsep jangka benah itu coba diterapkan pada kawasan hutan yang rusak akibat ekspansi kebun kelapa sawit. Konsep yang diperbarui itu diartikan sebagai periode waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki struktur dan fungsi ekosistem hutan yang rusak tersebut. (Dro/Hym/X-6)

<https://www.ugm.ac.id>
<https://www.penelitian.ugm.ac.id>
<https://www.pengabdian.ugm.ac.id>

Jangka Benah: Menata Kebun Sawit di Kawasan Hutan, Menyejahterakan Masyarakat

- Booming ekonomi kelapa sawit di Nusantara memicu persoalan lain, yakni permasalahan ekologi dan deforestasi.
- Permasalahan ketelanjuran kebun sawit di kawasan hutan belum mendapatkan solusi terbaik.
- Sejak 2018, Fakultas Kehutanan UGM membentuk tim kecil untuk mengadakan berbagai diskusi multipihak dan lintas disiplin agar dapat mengurai permasalahan dan mencari solusi terbaik.

- Istilah jangka benah sebagai alternatif solusi persoalan kebun sawit rakyat di kawasan hutan mulai dikenalkan perdana pada kertas posisi yang disusun tim Fakultas Kehutanan UGM.
- Fakultas Kehutanan UGM merancang Sekolah Jangka Benah yang dapat diikuti seluruh pihak untuk memberikan pemahaman tentang konsep dan implementasi jangka benah.

Apa itu Strategi Jangka Benah (SJB)?

- Upaya sosioteknis-kebijakan untuk memperbaiki struktur dan fungsi ekosistem hutan yang rusak.
- Perbaikan dilakukan secara periodik melalui penguatan kelembagaan, tindakan silvikultur yang terjadwal, dan dukungan kebijakan.

Mengapa SJB?

- Merupakan jalan tengah paling rasional untuk mengatasi konflik tenurial kebun sawit di kawasan hutan.
- Melalui SJB, perbaikan fungsi ekologis kawasan hutan dilakukan tanpa mengisolasi tanaman sawit yang ada sehingga persoalan sosial dan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan.

Siapa yang Menerapkan SJB?

- Sesuai dengan ketentuan PP No 3 Tahun 2021 dan PP No 24 Tahun 2021, jangka benah wajib dilakukan pengelola kebun rakyat di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi melalui skema perhutanan sosial.
- Wajib dilakukan pelaku usaha perkebunan sawit yang mengalami tumpang-tindih perizinan di hutan produksi.

Di Mana SJB Diterapkan?

- Dilakukan pada berbagai tapak hutan yang rusak akibat berbagai gangguan.
- Berdasarkan data Auriga pada 2019, terdapat kurang lebih 3,4 juta hektare kebun sawit yang berada dalam kawasan hutan dengan 750 ribu hektare diduga dikelola rakyat dan sisanya korporasi.

Bagaimana SJB Dilaksanakan?

Dilaksanakan untuk mengubah struktur dan fungsi kawasan hutan 'tidak normal' menjadi 'normal' melalui 2 tahap, yaitu kawasan sawit monokultur menjadi agroforestri sawit dan agroforestri sawit menjadi agroekosistem hutan campuran.



Peluang Praktik Agroforestri Sawit

- Meningkatkan rasio kesetaraan lahan dibandingkan dengan praktik budidaya kelapa sawit monokultur sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
- Meningkatkan resiliensi petani kelapa sawit terhadap fluktuasi harga sawit karena petani bisa mengandalkan komoditas selain kelapa sawit sebagai sumber pemasukan.
- Praktik heterokultur meningkatkan keanekaragaman hayati.
- Struktur vegetasi dengan sistem perakaran yang kompleks dapat meningkatkan infiltrasi tanah sehingga mengurangi aliran permukaan dan memperbanyak imbuhan air ke dalam sistem air tanah. Hal itu dapat mengurangi risiko banjir dan kemarau.
- Meningkatkan stok karbon dan mengurangi emisi karbon yang ada di atmosfer.

Sumber: UGM/Litbang M/Grafis: Duta

Kunci Keberhasilan Jangka Benah UGM

PADA 2019, Fakultas Kehutanan UGM menjalin kerja sama dengan Yayasan Kehati melalui program SPOS Indonesia (SPOSI) untuk mengimplementasikan konsep jangka benah pada dua lokasi pilot project di Jambi dan Kalimantan Tengah. Jangka benah pun mulai menemukan semangat baru karena dapat diujicobakan langsung di lapangan.

Selain itu, Fakultas Kehutanan UGM menjalin kerja sama dengan Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, BPDASHL Kahayan, Universitas Palangka Raya, dan Universitas Jambi.

Tim peneliti merumuskan ada tiga kunci keberhasilan jangka benah sebagai solusi persoalan ketelanjuran kebun sawit di kawasan hutan. Pertama, aspek keberhasilan praktik agroforestri sawit; kedua, dukungan kebijakan; dan ketiga, penguatan kelembagaan.

Kami berusaha mengubah persepsi di kalangan petani sawit konvensional bahwa praktik mencampur sawit dengan tanaman lain dapat menurunkan produksi tandan buah segar (TBS). Caranya dengan memberikan kejelasan mengenai teknik agroforestri sawit yang tepat serta kejelasan perhitungan finansial kebun sawit campur. Hasil survei menunjukkan, tanpa ada kejelasan, sulit untuk mengajak petani sawit konvensional melaksanakan jangka benah.

Untuk mencapai hal tersebut, tim peneliti membangun demplot percontohan tanaman agroforestri sawit di Jambidan Kalimantan Tengah. Hingga saat ini, luas demplot jangka benah mencapai 170 hektare dan melibatkan 90 petani binaan dari 12 kelompok tani hutan. Demplot ini bertujuan mengetahui teknik agroforestri sawit yang paling optimal dan produktif sehingga dapat menjadi acuan bagi petani sawit lainnya.

Untuk peningkatan kapasitas SDM, Fakultas Kehutanan UGM merancang Sekolah Jangka Benah yang dapat diikuti seluruh pihak yang terkait, dari petanisasi sawit, pejabat LSM, staf pemerintah (pusat dan daerah), hingga akademisi.

Sejak mulai dibahas pada 2018 oleh tim peneliti Fakultas Kehutanan UGM, perkembangan konsep dan implementasi jangka benah sudah berkembang cukup pesat dan berhasil menjadi kebijakan nasional untuk menyelesaikan kesengkarutan persoalan kebun sawit di kawasan hutan.

Dengan jangka benah, kualitas lingkungan diharapkan dapat menjadi lebih baik dengan tetap memberikan keuntungan secara finansial kepada petani selama proses transisi dari sawit monokultur menuju bentuk hutan campur.

Perjalanan jangka benah masih sangat panjang. Tantangan utamanya ialah meyakinkan para pihak terkait bahwa jangka benah merupakan jalan tengah terbaik untuk mencapai keseimbangan antara profit, planet, and people. (Dro/Hym/X-6)